

Sekolah Berasrama; Penjaminan Mutu dan Implementasi

Sulhan Hamid H Lubis¹, Sri Milfayetti², Saut Purba³, Eka Daryanto⁴

Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Sumatera Utara
sulhanhamid@gmail.com

Abstract

Data obtained from dapodik as many as 934 high schools throughout Indonesia that provide education with dormitory services. The proliferation of boarding schools is inseparable from the quality of education provided by the school. Until today, there is no quality standard for boarding schools because each school has its own peculiarities / characteristics and is no exception at SMAN 2 Plus Panyabungan mandailing Natal regency, North Sumatra. In this study using qualitative descriptive method. Data collection using documentation and literature techniques. Data analysis goes through several stages, namely data reduction, display data, and conclusion/verification. The results of this study show that: 1) The mapping of the quality of education carried out by boarding schools varies greatly but still refers to the National Education Standards; 2) Making a quality improvement plan as outlined in the School Work Plan in accordance with the excellence of boarding schools; 3) Implementation of quality fulfillment both in school management and the learning process in boarding schools using the government curriculum and parenting curriculum; 4) Monitoring and evaluating the process of implementing quality fulfillment in terms of the characteristics of boarding schools; 5) Setting new standards and developing quality improvement strategies based on the results of monitoring and evaluation.

Keywords: Boarding School, Quality Assurance, Implementation

Abstrak

Data yang diperoleh dari dapodik sebanyak 934 SMA di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dengan layanan asrama. Menjamurnya sekolah berasrama tidak terlepas dari mutu pendidikan yang diberikan pihak sekolah. Sampai hari ini belum ada standar mutu sekolah berasrama karena masing-masing sekolah memiliki kekhasan/ ciri tersendiri dan tidak terkecuali di SMAN 2 Plus Panyabungan kab Mandailing Natal Sumatera Utara. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan literatur. Analisis data melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, data display, dan konklusi/verifikasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah berasrama sangat bervariasi namun tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 2) Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah sesuai dengan keunggulan sekolah berasrama; 3) Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran pada sekolah berasrama dengan menggunakan kurikulum pemerintah dan kurikulum pengasuhan; 4) Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dilihat dari karakteristik sekolah berasrama; 5) Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: Sekolah Berasrama, Penjaminan Mutu, Implementasi

Copyright (c) 2023 Sulhan Hamid H Lubis, Sri Milfayetti, Saut Purba, Eka Daryanto

Corresponding author: Sulhan Hamid H Lubis

Email Address: sulhanhamid@gmail.com (Universitas Negeri Medan, Kab. Deli Serdang, Kota Medan, Sumut)

Received 22 January 2023, Accepted 28 January 2023, Published 31 January 2023

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang dapat dijangkau (akses), bermutu, dan berkarakter sesuai dengan amanah UUD 1945, mencapai tujuan dan visi misi pendidikan nasional, pemerintah mengupayakan beberapa program strategis melalui persekolahan. Lazimnya di Indonesia, bentuk persekolahan formal ada sekolah reguler, pesantren dan sekolah berasrama. Sekolah Reguler adalah sekolah umum yang memanfaatkan kurikulum nasional Indonesia sebagai acuannya. Sekolah ini bisa berbentuk SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama) dan SMA (sekolah

menengah atas). Bentuk persekolahan selain sekolah reguler adalah pesantren. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Bab I pasal 1: Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, dan organisasi masyarakat islam, dan juga masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tidak secara khusus mengatur tentang Sekolah Berasrama. Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren lebih spesifik mengatur tentang pesantren sebagai salah satu bentuk sekolah berasrama. Berbagai aturan hierarki di bawahnya belum ada yang secara definitif menjabarkan tentang tema besar sekolah berasrama. Jika pun ada, keberadaannya terserak di antara aturan maupun pasal yang berbeda-beda. Di antaranya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 9/Permen/M/2008 Pasal 1, yang menyatakan bahwa:

“Lembaga Pendidikan Berasrama adalah penyelenggara pendidikan menengah yang berbentuk pendidikan umum, kejuruan dan/atau keagamaan atau pendidikan terpadu (pendidikan umum dengan pendidikan agama, atau pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan) yang dalam proses pembelajarannya mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama”. Dari 13.776 sekolah SMA, sekitar 93% menyelenggarakan pendidikan secara reguler. Selebihnya menyelenggarakan dengan pola asrama atau boarding school. Jika pada awalnya sekolah berasrama umum ini identik dengan sekolah swasta atau kedinasan, maka dewasa ini berkembang trend dimana sekolah pemerintah (negeri) sudah menerapkan sekolah berasrama.

Terdapat berbagai bentuk dan karakteristik pendidikan yang berbasiskan asrama (boarding school). Berbagai fakta yang ada di lapangan menghasilkan beberapa identifikasi antara lain: 1) Sekolah berasrama keagamaan dan sekolah berasrama umum. Sekolah berasrama keagamaan adalah sekolah berbasis asrama yang menyiapkan para pesertanya untuk memiliki penguasaan ilmu-ilmu keagamaan. Salah satu contoh dari tipe sekolah ini adalah sekolah berasrama bagi umat Islam, kita kenal sebagai pesantren. Adapun sekolah berasrama umum adalah sekolah-sekolah formal reguler yang mengikuti kurikulum nasional sekaligus memiliki fasilitas asrama bagi sebagian atau seluruh peserta didiknya. Sekolah berasrama model ini yang banyak disinggung oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, hingga diyakini bahwa pendidikan berbasis asrama adalah model pendidikan ideal di Indonesia.

Model penyelenggaraan sekolah berasrama sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, model asrama telah dikenal sejak lama dengan berbagai nama, seperti internat, pondok, perguruan, atau pondok pesantren. Dengan model ini, penyelenggaraan pendidikan dilakukan di mana peserta didik tinggal di kompleks sekolah selama 24 jam. Dalam penyelenggaraan pendidikan dengan model asrama dibutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan di sekolah reguler biasa. Hal tersebut disebabkan karena proses pembelajaran berlangsung dalam segala aktivitas siswa selama berada di sekolah. Tidak hanya

terpaku pada jam belajar klasikal di sekolah sesuai dengan tuntutan kurikulum. Namun sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang penjaminan mutu sekolah berasrama. Sekolah berasrama yang berada dibawah naungan kemendikbud ristek masih menggunakan sistem penjaminan mutu berdasarkan sekolah reguler. Begitu juga dengan sekolah yang berada dibawah naungan kementerian agama dan berbau pondok pesantren menggunakan penjaminan mutu berdasarkan undang-undang pesantren atau peraturan menteri agama. Hal inilah yang mendasari pemikiran penulis untuk menggali lebih lanjut tentang penjaminan mutu sekolah berasrama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang dideskripsikan dan bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjaminan mutu sekolah berasrama yang menjamur di Indonesia baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi dan literatur. Studi literatur yang dilakukan dengan mencari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, serta dokumen-dokumen yang dapat memudahkan peneliti dalam menemukan siapa saja yang berperan dalam menyumbangkan ide atau gagasan dalam penjaminan mutu sekolah berasrama. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan sampai tuntas. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan/ verifikasi. Data yang sudah dianalisis kemudian ditafsirkan dan disajikan kembali secara jelas melalui pembahasan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

Penjaminan mutu merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi sebagai bentuk konsekuensi atas tuntutan stakeholder terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang cakap dan terampil. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab para pemangku pendidikan bersama dengan pemerintah. Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana secara eksplisit disebutkan satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal wajib untuk melakukan penjaminan terhadap mutu pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. (Zahrok; 2020)

Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan mutu dilaksanakan dimulai dengan sekolah mengisi e-EDS (Aplikasi Pemetaan Mutu Sekolah). e-EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan

pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SNP. Hasil EDS dipakai sebagai dasar penyusunan RKS dan RKAS dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, serta sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai kinerja sekolah berdasarkan SNP, mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SNP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan dan menyusun RKS/RKAS sesuai kebutuhan nyata dalam rangka pemenuhan SNP.

Sementara itu pada pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN) Peserta Didik atau Santri Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Asesmen Nasional PKPPS ini adalah langkah fundamental dan strategis untuk pemetaan dan evaluasi mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran. Sistem pembelajaran di PKPPS harus dapat mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi para santri, serta menjaga karakter sosial-emosional. Lingkungan belajar yang dibangun juga diarahkan mendukung kreativitas dan profesionalitas guru (asatidz). Berikut, pengembangan kualitas pendidikan pada umumnya (media Indonesia; 26 Agustus 2022).

Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah berasrama sangat bervariasi namun tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sebagai institusi pendidikan, sekolah bersama juga harus mampu mengelola pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan (Dacholfany, 2017). Manajemen peningkatan mutu lulusan ini sebagai sebuah proses yang melibatkan semua bagian dalam institusi tersebut yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, untuk menghasilkan kinerja sekolah berupa prestasi siswa yang memuaskan (Permana, 2020; Rambe et al, 2020)

Pemetaan mutu dilakukan pada setiap satuan standar nasional pendidikan termasuk komponen serta masing-masing indikator di dalamnya, dan didukung dengan bukti fisik seperti silabus, RPP, instrumen penilaian, instrumen supervisi, dan lain sebagainya. Lebih baik jika hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari evaluasi diri sekolah disajikan secara singkat namun informatif (Kemendikbud RI, 2016). Selanjutnya dilakukan pengecekan kebenaran data, olah data, dan analisis data oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk dapat menghasilkan data yang mutakhir dan akurat yang mampu mempresentasikan capaian mutu SMA Negeri 2 Plus Panyabungan terhadap standar nasional pendidikan. Di dalamnya, diuraikan pula masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam kurun waktu satu tahun pada masing-masing satuan standar nasional pendidikan, serta rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk perbaikan ke depan.

Rencana Peningkatan Mutu

Perencanaan pada intinya merupakan upaya penentuan ke mana sebuah organisasi akan menuju pada masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan. Perencanaan peningkatan mutu adalah upaya mengisi kesenjangan antara keadaan satuan pendidikan sekarang dengan keadaan yang diharapkan pada SNP. Pada sekolah reguler rencana peningkatan mutu merupakan aktivitas mencari solusi dengan cara melakukan upaya yang bersumber dari kekuatan sendiri, dengan aktivitas:

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan.

Menuangkan hasil perencanaan ke dalam dokumen penyusunan rencana peningkatan mutu sekolah

Kepala sekolah, TPMPS, dan seluruh warga sekolah perlu duduk bersama menyusun atau menyempurnakan rencana kerja sekolah.

Proses perencanaan peningkatan mutu diawali dengan melakukan Evaluasi Diri Sekolah. Evaluasi diri sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri yang bersifat internal untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang kemudian penjabarannya secara rinci pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu rencana penjaminan mutu pesantren berdasarkan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren pada pasal ke 26 paragraf kedua disebutkan bahwa yang berhak merumuskan standar mutu pesantren adalah dewan masyayikh dan kemudian akan disahkan oleh kementerian agama sebagai induk yang memayungi pendidikan pesantren. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan adalah standar yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP). (Istiqomah dkk, 2021). Pesantren modern dan semi moderen yang mengimplementasikan SNP (Standar Nasional Pendidikan) adalah lembaga formalnya. Sebab mereka menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya integratif yakni mengintegrasikan antara diniyah, pesantren. Sementara pesantren salaf tidak mengacu pada 8 SNP dan tidak mau diintervensi pemerintah.

Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah sesuai dengan keunggulan sekolah berasrama. Proses perencanaan mutu pendidikannya meliputi: (1) analisis dan diagnosis, (2) penyusunan draft rencana program, (3) sosialisasi program, (4) penyusunan anggaran pembiayaan, dan (5) pendokumentasian. Hal ini sesuai dengan pendapat Rivai dan Murni bahwa perencanaan dilakukan: pertama, membuat peta keadaan pendidikan; Kedua, berdasarkan peta tersebut, disusun pula masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan analisis SWOT; ketiga, menyusun rencana pendidikan; dan keempat, penganggaran (Murni, 2009, p. 113).

Perencanaan mutu pendidikan sekolah berasrama dimulai dengan penyusunan rencana strategis (Renstra) atau rencana kerja sekolah (RKS) sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan untuk kurun waktu empat tahun ke depan melalui SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). SWOT analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

internal organisasi, dan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal organisasi. Langkah ini dilakukan agar program-program pendidikan yang dibuat dapat teraplikasi dengan baik dan relevan dengan kebutuhan lingkungan dan perkembangan zaman. (Apud; 2018)

Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Sekolah melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sehingga standar dapat tercapai dengan cara: 1) Memperhatikan rencana pemenuhan mutu dan jadwal sebagaimana yang telah disusun sebelumnya. 2) Mengisi tabel 1 lembar implementasi pemenuhan mutu, 3) Menetapkan penanggung jawab kegiatan. 4) Penanggung jawab mengusulkan tim pelaksana yang akan dilibatkan. 5) Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. 6) Menetapkan bukti fisik yang mendukung keterlaksanaan kegiatan. 7) Melaksanakan pemenuhan mutu berdasarkan jadwal. 8) Membuat laporan pelaksanaan implementasi pemenuhan mutu dan dilampiri dengan bukti fisik.

Standar mutu yang ditetapkan pesantren meliputi delapan komponen standar yang diantaranya mengandung ciri khas pesantren seperti adanya kurikulum muatan lokal kaligrafi dan kajian kitab kuning. Nilai-nilai pesantren yang muncul di antaranya adalah nilai kemandirian yang ditunjukkan dengan memiliki idealisme acuan mutu tertentu, nilai tanggung jawab yang ditunjukkan dengan kemampuan mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik, nilai moralitas yang ditunjukkan dengan keterbukaan dan kejujuran terhadap arah mutu madrasah, nilai sosial yang ditunjukkan dengan adanya penyesuaian terhadap visi misi dan kondisi madrasah, nilai keakraban dan kebersamaan yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk meraih tujuan secara bersama-sama. Nilai yang mendominasi pada tahap ini adalah nilai moralitas (Fakhrurrazi & Sebgag, 2020; Ma'arif, 2017).

Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran pada sekolah berasrama dengan menggunakan kurikulum pemerintah dan kurikulum pengasuhan. Manajemen kurikulum pada sekolah berasrama tidak jauh berbeda dengan manajemen di sekolah. Bagian kurikulum secara rutin mengadakan Rapat kerja untuk menyusun program-program keasramaan, melakukan controlling, monitoring, dan evaluasi. Model pembelajaran dilakukan secara terstruktur, moving class, dan outdoor activity. Kegiatan penilaiannya pun berbentuk test dan non test. Selanjutnya, bagian kepegawaian meliputi mudir boarding, wali kamar, kemakmuran, keamanan dan kebersihan, serta sekretaris dan keuangan. Pembagian posisi tersebut dilakukan oleh pihak pengelola asrama. Kemudian pengelolaan bagian kesiswaan memiliki prosedur yang sama dengan prosedur sekolah. Begitu pula dengan humas, sarana prasarana, dan layanan khusus boarding dilaksanakan sejalan dengan sekolah. (Fitria; 2021)

Dalam menyusun rencana pemenuhan mutu Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah SMAN 2 Plus Panyabungan akan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain visi misi sekolah, kebijakan internal sekolah, serta kebijakan pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar rencana pemenuhan mutu dapat mencapai standar nasional pendidikan dengan tetap mengacu pada efektivitas tujuan sekolah. Rencana pemenuhan mutu yang telah disusun selanjutnya dituangkan dalam bentuk

dokumen perencanaan mutu atau Rencana Kerja Sekolah (RKS) baik jangka menengah maupun jangka panjang. RKS disusun secara sistematis mencakup berbagai komponen, selanjutnya diuraikan secara spesifik yaitu terkait bentuk program pemenuhan mutu, tujuan, strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta rincian biaya yang dibutuhkan

RKS yang telah disusun mula-mula diajukan pada kepala sekolah untuk diteliti dan ditindaklanjuti. Apabila dirasa telah sesuai maka RKS akan disetujui dan disahkan oleh kepala sekolah. Setelah disahkan, kemudian RKS dapat disosialisasikan pada seluruh anggota sekolah. Selesai dilakukan kegiatan sosialisasi, rencana pemenuhan mutu selanjutnya direalisasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen sekolah baik kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orangtua siswa. Saat ini, hampir seluruh komponen di SMA Negeri 2 Plus Panyabungan telah memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakannya. Prosedur yang ditempuh secara keseluruhan meliputi tiga tahap, dimulai dari persiapan, penyusunan RKS, dan dilanjutkan dengan pengesahan RKS. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016.

Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis menginvestigasi efektivitas program. Menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi).

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk: 1) melihat bagaimana proses pendampingan dalam proses penerapan sistem penjaminan mutu internal; 2) melihat dampak pendampingan dalam proses penerapan sistem penjaminan mutu internal; 3) melihat kemampuan sekolah dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal; dan 4) melihat budaya mutu yang terbentuk di lingkungan sekolah. Metode monitoring dan evaluasi dapat berbentuk metode dokumentasi seperti laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan, metode survei, metode observasi lapangan, metode wawancara dan metode FGD.

Pada intinya kegiatan monitoring dan evaluasi pada sekolah reguler, pesantren dan sekolah berasrama tidak ada perbedaan yang mendasar. Hal ini dilakukan dengan memberikan instrumen yang harus diisi oleh sekolah untuk melihat sampai sejauh mana mereka memahami sekolah model, kendala apa yang dihadapi lalu dianalisis. Dari hasil analisis itu akan terlihat apakah ada permasalahan atau tidak dalam implementasi sekolah model yang nantinya akan menjadi masukan pada tahun yang akan datang. Pedoman ini memberikan arahan bagaimana untuk memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi secara umum dilihat dari aspek manajemen, proses belajar dan hasilnya, dan kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya, dampak penjaminan mutu sekolah terutama pengetahuan, keterampilan dan perilaku

perubahan anggota sekolah, dukungan stakeholder dan keterlibatan masyarakat. (Jamaluddin dan Sopiha; 2018)

Pelaksanaan pemenuhan mutu di SMAN 2 Plus Panyabungan, selalu dimonitor oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan mutu melalui evaluasi diri sekolah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pemenuhan mutu serta kesesuaiannya dengan rencana pemenuhan mutu, guna menjamin terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, selanjutnya akan dilakukan penetapan standar mutu baru sebagai upaya pemenuhan mutu kedepannya. Standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMAN 2 Plus Panyabungan.

Penetapan Standar Baru

Penetapan standar baru dan penyusunan strategi baru. Penyusunan strategi perlu dilakukan jika sekolah belum mampu mencapai SNP berdasarkan strategi sebelumnya. Sekolah yang telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan dapat menetapkan standar baru di atas standar nasional pendidikan.

Proses penetapan standar mutu di SMAN 2 Plus Panyabungan melibatkan seluruh personil sekolah. Standar mutu yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu utamanya adalah delapan standar nasional pendidikan, Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kebijakan pemerintah lain yang sesuai. Penetapan standar mutu di SMAN 2 Plus Panyabungan juga didasarkan pada visi misi dan tujuan sekolah serta disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Standar mutu di SMAN 2 Plus Panyabungan dapat berubah seiring waktu dan mengikuti tuntutan kualitas yang diharapkan stakeholders. Fattah (2012) menyebutkan bahwa orangtua, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain di dunia usaha dan industri sebagai stakeholders pendidikan yang seringkali memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu menanggapi segala perubahan dengan penetapan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai sekolah yang bermutu (Sodiq & Haryana, 2017). Seluruh langkah penjaminan mutu yang dilaksanakan SMAN 2 Plus Panyabungan menghasilkan catatan atau rapor Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan hasil yang baik.

KESIMPULAN

Sekolah berasrama berawal dari kesadaran akan pentingnya mengakomodasi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan atau pembinaan karakter dan mental yang tidak didapatkan pada sekolah reguler. Sekolah berasrama pada instansi pemerintah memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dengan pesantren. Namun pada kenyataannya belum ada payung hukum penjaminan mutu pendidikan sekolah berasrama sehingga masih lebih mengacu pada Permendikbud no 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat belum adanya regulasi penjaminan mutu sekolah berasrama, maka masing-masing sekolah berasrama memiliki kekhasan tersendiri dalam menjamin mutu lulusannya. Untuk penjaminan mutu pendidikan di sekolah berasrama dilakukan Pemetaan mutu pendidikan, pembuatan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran pada sekolah berasrama dengan menggunakan kurikulum pemerintah dan kurikulum pengasuhan, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dilihat dari karakteristik sekolah berasrama; dan penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Ke depan perlu ada regulasi yang menjadi acuan bagi sekolah berasrama agar lulusan yang dihasilkan benar-benar memiliki karakteristik tersendiri.

REFERENSI

- Mustofa, Idam, (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan). *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2020, ISSN: 2622-6161 (Online) 2598-8514 (Print)
- Dacholfany, M.I. (2017). Inisiasi strategi manajemen lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia islami di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*,1(01)
- Permana, W. A. (2020). Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 5 (1), 83-96.
- Rambe, A. I. S., Nasution, P., & Yusri, D. (2020). Perencanaan Strategis Dalam Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Di MTs Darul Ilmi Pangkalan Berandan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 69-81. <https://mediaindonesia.com/humaniora/517881/kemenag-petakan-mutu-pendidikan-kesetaraan-di-pesantren>
- Istikomah dkk, (2021). *Buku Ajar Sistem Penjaminan Mutu Pesantren*, Umsida Press
- Apud, (2018). *Manajemen Mutu Pendidikan MAN Insan Cendekia (Analisis Terhadap Pengelolaan Mutu Program Akademik Di Man Insan Cendekia Serpong-Tangerang Selatan)*, Tarbawi: *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*. Vol. 4 No. 02, Desember 2018, 171-190
- Fakhrurrazi, F., & Sebgag, S. (2020). *Methods of Learning Kitab Kuning for Beginners in Islamic Boarding School (Dayah)*. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 296–310. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i3.838>
- Ma'arif, M. A. (2017). Hukuman (punishment) Dalam Perspektif Pendidikan Di Pesantren. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.21274/taalum.2017.5.1.1-20>
- Fitria, Rizka, (2021). Implementasi Manajemen Pendidikan Sekolah Berbasis Boarding Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Al-Wildan Islamic Boarding School Tangerang. *Management of Education; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjar Masin*, DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/moe.v7i1>

- Jamaluddin dan Sofiah, (2018). Desain Sekolah Model: Studi Penjaminan Mutu Pendidikan, Indonesian Journal of Educational Research (IJER), UIN SulthanThaha Saifuddin Jambi. Jan 1, 2018 DOI: <https://doi.org/10.30631/ijer.v2i2.47>
- Zahrok, Asnaul Lailina Nikmatuz, (2020). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume8, No.2, September 2020(196-204). Online: <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Fattah, Nanang, (2012). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sodiq, R., & Haryana, K. (2017). Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang. E-Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif-S1, 18 (2), 111-121. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/otomotif-s1/article/view/10131/9695>